

**PERANAN DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

MARETHA AMNESSIA

NIM / TM : 97300/2009

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2013

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam

Nama : Maretha Amnesia
TM/NIM : 2009/97300
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 September 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Drs. Yasril Yunus, M.Si.
NIP. 19531017 198211 1 002

Pembimbing II



Dr. Fatmariza, M.Hum
NIP. 19660304 199103 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

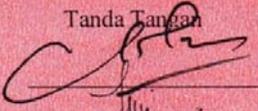
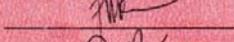
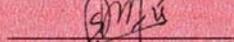
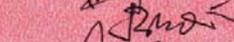
Pada Hari Kamis Tanggal 5 September 2013, pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Dalam
Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanjung
Mutihara Kabupaten Agam**

Nama : Maretha Amnesia
TM/NIM : 2009/97293
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

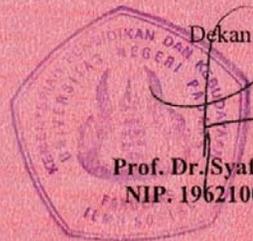
Padang, 5 September 2013

Tim Penguji

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|----------------------------|--|
| Ketua | : Drs. Yasril Yunus, M.Si |  |
| Sekretaris | : Dr. Fatmariza, M.Hum |  |
| Anggota | : Dra. Al Rafni, M.Si. |  |
| Anggota | : Adil Mubarak, S.IP. M.Si |  |
| Anggota | : Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D |  |

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maretha Amnesia
TM/NIM : 2009/97300
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 September 2013

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

9AACBABF772601141

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DUP

MARETHA AMNESSIA

97300/2009

ABSTRAK

MARETHA AMNESSIA 97300/2009 : Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan UMKM khususnya di Bidang Pemberdayaan UMKM yaitu berupa pemberdayaan, pembinaan dan pengawsan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan secara *purposive sampling* sesuai dengan tujuan penelitian yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Jenis data yang digunakan antara lain data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan UMKM belum terlaksana secara efektif. Adapun beberapa kendala-kendala dalam melaksanakan peranannya sebagai pemberdaya yaitu minimnya pegawai yang melakukan penyuluhan atau pembinaan, pola pikir pengusaha yang sulit diajak maju karena masih bersifat tradisional, manajemen modal juga menjadi kendala yang utama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas yaitu dinas melakukan pembinaan sebagai program pemberdayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, memberikan pembinaan yang lebih banyak lagi untuk kemajuan UMKM.

KATA PENGANTAR

ميجرلا نمرلا هللا مسب

Alhamdulillah. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan rahmatNya, skripsi yang berjudul **“Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam”** dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada ju

hati dan pikiran kita :

Skripsi ini c
menyelesaikan pen
Administrasi Publik
Penyelesaian skripsi
berbagai pihak, olef
terima kasih kepada:



lah membuka mata

satu syarat untuk
lar Sarjana Ilmu
tas Negeri Padang.
si dan bantuan dari
lis menyampaikan

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berkenan memberikan izin penelitian ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D sebagai Pembimbing Akademik yang memberikan saran dan masukan dalam dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir.

4. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan serta sebagai inspiratif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr Fatmariza, M.Hum, selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi, membimbing, dan memberi masukan serta motivator bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Suryanef, M.Si, Dra. Al Rafni, M.Si dan Adil Mubarak, S.IP. M.Si selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Syafrial, Sos selaku Kepala Bidang UMKM, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi.
8. Bapak M.Sofyan, S, St selaku Kasi Bidang UMKM yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
9. Ibu Yusnani selaku Staf Bidang UMKM yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
10. Selurang Staf Bidang UMKM yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
11. Ibu Yarni, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi tentang usaha kelompoknya.

12. IbuIrma yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, serta seluruh keluarga yang telah memberikan do'a khususnya, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan do'a, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekkan program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2009, terima kasih atas segala kebaikannya.
15. Semua teman-teman yang telah memberi dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan baik itu dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Meski begitu, penulis tetap berharap bahwa karya ini bisa menjadi banyak manfaat bagi semua pihak. Amin.

Padang, 2013

Maretha Amnesia

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah, Pembatasan, dan Rumusan Masalah | 4 |
| C. Fokus Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| | |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teoritis | 8 |
| B. Kerangka Konseptual..... | 22 |
| | |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 25 |
| B. Lokasi Penelitian | |
| C. Informan Penelitian | 26 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 27 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| G. Teknik Keabsahan Data | 30 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 30 |

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|-----------------------|----|
| A. Temuan Umum | 33 |
| B. Temuan Khusus..... | 39 |
| C. Pembahasan | 59 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan memiliki beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi UMKM Perindustrian, perdagangan dan pasar serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam terdapat 902 Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sesuai data rekapitulasi yang ada di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam terdapat 46 usaha kecil, yang tersebar keberbagai macam jenis bidang usaha.

Tabel 1.1
Rekapitulasi jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sektor di bidang perdagangan/jasa di Kabupaten Agam

| Kecamatan | Bidang Usaha | | | | | Ket |
|--------------------|--------------|-------|----------|-------|--------|-----|
| | Mikro | Kecil | Menengah | Besar | Jumlah | |
| TanjungMutiar a | 854 | 46 | 2 | - | 902 | |

Sumber: Rekapitulasi jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan perdagangan tahun 2012

Dari data di atas, secara kuantitas untuk skala Kecamatan Tanjung Mutiara dianggap memiliki usaha kecil yang cukup banyak, namun secara kualitas tentu masih sangat bisa di analisa secara mendalam. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan ke beberapa usaha kecil yang ada di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, masih banyak persoalan-persoalan dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut seperti: persoalan permodalan menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang karena keterbatasan ini mereka tidak mampu untuk berdaya, persoalan kualitas sumber daya manusia yang kurang kreatif dan inovatif menyebabkan kurangnya permintaan pasar dan menyebabkan juga produktifitas berkurang.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya perhatian Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam terhadap perkembangan usaha kecil yang ada di Kecamatan Tanjung Mutiara. Wawancara awal yang peneliti lakukan dengan salah satu kelompok usaha kecil yang ada di Kecamatan Tanjung Mutiara membuktikan asumsi peneliti di atas, berikut petikan wawancara dengan Ibu Irma selaku Ketua kelompok usaha Mekar Jaya bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan dek dinas cuma sakali waktu pas peresmian kelompok usaha yang kami dirikan iko. Pas datangpun dinas hanyo manulis dokumen-dokumen yang inyo paralu untuk ka dijadian data, seperti mananyoan namo kelompok usaha kami, struktur anggota kami, produk yang kami produksi dan yang banyak berkaitan samo apo yang di butuhkannyo se.”(wawancara tanggal 30 mei 2013)

Fakta di atas menggambarkan bahwa Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam terkesan belum melaksanakan perannya dengan maksimal. Padahal Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, telah

mengatur sejelas-jelasnya tentang peran yang harus dilaksanakan terkait perkembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah khususnya usaha kecil.

Dalam Peraturan Bupati pada bagian keempat (Bidang Pemberdayaan) pasal 15 pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 secara rinci menggambarkan apa-apa yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal fungsi pemberdayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah khususnya di Kecamatan Tanjung Mutiara.

Di pasal 15 ayat 2 ada beberapa fungsi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan bidang pemberdayaan antara lain perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan bina usaha, pelaksanaan pelayanan dibidang kelembagaana dan bina usaha. Kemudian di pasal 17 ayat 2 juga diuraikan tugas seksi kelembagaan yang terkait dengan kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam menumbuhkan iklim usah yang kondusif yang meliputi persoalan pendanaan, persaingan, sarana dan prasarana, informasi, kemitraan dan yang lainnya. Di pasal 18 ayat 2 juga diuraikan beberapa peran seksi bina usaha dalam pemberdayaan misalnya melaksanakan pembinaan, mengidentifikasi dan up dating data usaha mikro kecil dan menengah kemudian membina dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah meliputi pembinaan dan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi dan desain.

Itulah program-program pemberdayaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan untuk memaksimalkan

peran dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan tersebut. Tetapi melihat kenyataan yang peneliti amati di lapangan terkesan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan tidak melaksanakan perannya dengan baik oleh karena itu untuk mendapatkan kebenaran ilmiah atas beberapa asumsi di atas maka peneliti ingin meneliti sejauhmana Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Agam di Kecamatan Tanjung Mutiara. Dengan judul **“Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam”**

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul terhadap Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap pemberdayaan masyarakat Kabupaten Agam.

- a. Usaha Kecil tidak berkembang karena disebabkan Tidak adanya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Dinas terhadap perkembangan kelompok UMKM yang ada di Kecamatan Tanjung Mutiara.
- b. Rendahnya kualitas SDM, kondisi kualitas SDM yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, kelemahan daya inovasi dan kreatifitas serta

rendahnya disiplin, etos kerja dan profesionalisme dikalangan Koperasi dan UMKM.

- c. Peran dinas selaku pemberdaya tidak dilakukan dengan baik terlihat dari indikasi permasalahan yang ada seperti kurang berkembangnya Usaha Kecil tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas agar penelitian ini lebih terarah maka permasalahannya dapat dibatasi pada Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?
- b. Apasaja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
- c. Apasaja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam meningkatkan keberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar peranan Dinas koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan perdagangan dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengetahui apasaja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Untuk mengetahui apasaja upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

E. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai maka suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Secara subjektif adalah suatu tahap sebagai suatu tahap untuk melatih dan mengembangkan kemampuan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis

melalui suatu karya ilmiah sehingga diperoleh satu kesimpulan yang bersifat teruji dan berguna.

2. Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu menambah pengetahuan ataupun informasi tentang program pemberdayaan kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya pengembangan jaringan pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan masalah yang dihadapi.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi empirik terhadap studi kebijakan (konsentrasi kebijakan) di keilmuan administrasi Negara dan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Padang mengenai studi evaluasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan dengan membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan/kemampuan. (Kamus Bahasa Indonesia)

Prijono dan Pranaka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti, pertama adalah memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Disisi lain pemaknaan kedua adalah proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Carlzon & Macauley (Bahan hajar pemberdayaan 2012) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberikan orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.

Wibowo (2009:136) mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya dan berwenang atau lebih berkemampuan untuk meyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan sehingga menumbuhkan rasa tanggungjawabnya.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat agar masyarakat dapat menjadi masyarakat yang mampu untuk berdaya.

b. Peraturan Bupati Agam Nomor 28 Tahun 2008

Penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugas Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan. (1) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di Bidang Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, (2) dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi UMKM Perindustrian, Perdagangan dan pasar; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada bab II bagian keempat pasal 15 dalam Peraturan Bupati Agam nomor 28 tahun 2008 membahas tentang Bidang Pemberdayaan UMKM dapat diuraikan sebagai berikut: (1) bidang Pemberdayaan UMKM mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan umkm; (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan UMKM mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan bina usaha; b. Pelaksanaan pelayanan di bidang

kelembagaan dan bina usaha; c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan atasan.

Pada pasal 17 terdapat tugas dari seksi kelembagaan, pada ayat (1) seksi kelembagaan ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Ayat (2) uraian tugas seksi kelembagaan yaitu: a. Melaksanakan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam menumbuhkan iklim usaha yang kondusif meliputi: 1) pendanaan/penyediaan informasi sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; 2) persaingan; 3) sarana dan prasarana; 4) informasi; 5) kemitraan; 6) perizinan; 7) perlindungan dan 8) kewirausahaan. b. Melaksanakan, memperkuat dan memberdayakan organisasi ditingkat usaha mikro kecil dan menengah baik organisasi usaha sejenis (asosiasi) maupun bentuk lainnya; c. Melaksanakan fasilitasi akses dan penjaminan dalam penyediaan modal bagi usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi: 1) kredit perbankan; 2) penjaminan lembaga non bank; 3) modal Ventura; 4) PKBL-BUMN; 5) hibah; 6) sumber pembiayaan lainnya. d. Melaksanakan pembinaan di bidang kelembagaan; e. Melaksanakan kerjasama dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah dengan dinas dan organisasi terkait; f. Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya HAKI, produk bersih dan berwawasan lingkungan; g. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; h. Melaksanakan pembuatan program pelatihan, magang dan temu usaha mikro kecil dan menengah.

Pada pasal 18 dalam peraturan Bupati Agam nomor 28 tahun 2008 tentang tugas seksi bina usaha, (1) seksi bina usaha mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina usaha. (2) uraian tugas seksi bina usaha yaitu: a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah; b. Melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah; c. Melaksanakan identifikasi dan Up Dating data usaha mikro kecil dan menengah; d. Melaksanakan pembuatan program pengembangan sarana promosi/packing produk usaha mikro kecil dan menengah; e. Melaksanakan misi dagang dan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah dalam dan luar daerah; f. Melaksanakan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembiayaan dan investasi usaha mikro kecil dan menengah; g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah meliputi: produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan desain.

c. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Prinsip dasar pemberdayaan secara umum:

- a) Untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dari setiap kegiatan yang dikelola.
- b) Konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
- c) Dalam pelaksana program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik (termasuk di dalamnya kegiatan

pengembangan usaha), merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

- d) Dalam mengimplementasikan program pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya (resources), khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, masyarakat maupun sumber-sumber lainnya, seperti donasi dan sponsor pembangunan sosial.
- e) Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih mengfungsikan diri sebagai “katalis” yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Prinsip – prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk karya dengan prakarsa sendiri.
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- c) Berkembangnya usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- d) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

d. Tahap-tahap Pemberdayaan

1). Tahap 1. Seleksi Lokasi/Wilayah

Seleksi desa atau dusun dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan

kriteria penting agar tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin.

2). Tahap 2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan ini untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi PM membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat dalam program.

3). Tahap 3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (tujuan umum). Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- a) Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluang

Tahap ini sering dikenal dengan “kajian keadaan pedesaan partisipatif” atau sering dikenal dengan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan macam-macam teknik visualisasi (misalnya gambar, tabel dan bentuk/diagram) untuk proses analisa keadaan. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa kedaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan

kelembagaan. Tahapan dalam proses kajian meliputi: (1) persiapan desa dan masyarakat (menentukan teknis pertemuan), (2) persiapan dalam tim (keepakatan teknik PRA, alat dan bahan, pembagian peran dan tanggungjawab), (3) pelaksanaan kajian keadaan: kegiatan PRA dan (4) pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

b) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian

Setelah teridentifikasi segala potensi dan permasalahan masyarakat, langkah selanjutnya adalah memfokuskan kegiatan pada masyarakat yang benar-benar tertarik untuk melakukan kegiatan bersama. Pembentukan kelompok berdasar kemauan masyarakat dan dapat menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya dilengkapi dengan kepengurusan dan aturan. Kelompok dengan difasilitasi oleh fasilitator menyusun rencana kelompok berupa rencana kegiatan yang konkrit dan realistis. Tahapan penyusunan dan pelaksanaan rencana kelompok:

- a. Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah hasil PRA lebih rinci.
- b. Identifikasi alternatif pemecahan masalah terbaik.
- c. Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah.
- d. Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

c) Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

d) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus (Monitoring dan Evaluasi Partisipatif/M & EP).

M & EP dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar proses PM berjalan dengan tujuannya. M & EP adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan PM, baik *prosesnya* (pelaksanaan) maupun *hasil dan dampaknya* agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

4). Tahap 4. Pemandirian Masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pendampingan kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

e. Kendala-kendala Pemberdayaan

Mardikanto (2012:36), mengungkapkan ada beberapa dilema dalam pemberdayaan yaitu:

Petama, upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak berhadapan dengan kenyataan pasti. ***Kedua***, berkaitan dengan relativitas dalam mengukur

keberhasilan upaya pemberdayaan merupakan masalah tersendiri, karena keberhasilan sendiri masih diperdebatkan dalam konteks teknis atau substantif. **Ketiga**, bentuk-bentuk upaya pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan seringkali justru tidak menjawab masalah ketidakberdayaan itu. **Keempat**, meyangkut keberlanjutan program/kegiatan. **Kelima**, agenda-agenda yang sifatnya politik atau penguatan kelembagaan lebih dipilih sebagai agenda kedua setelah berbagai agenda yang menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan perut. **Keenam**, bentuk pemberdayaan dengan pola kemitraan menjadi fenomena menjadi yang cukup menarik. **Ketujuh**, isu globalisasi, menghadapkan Negara tentang pentingnya pasar dan ada upaya-upaya untuk menyusutkan peran Negara padahal, ketidakberdayaan masyarakat justru seringkali diakibatkan oleh pembangunan yang berorientasi pada pasar. **Kedelapan**, dalam konteks Indonesia, Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebenarnya sudah dirancang lewat pemikiran-pemikiran pendiri bangsa yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Prijono, Pranaka 1996:148-149). Masalah besar yang dapat dianggap sebagai kendala dalam mewujudkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini adalah tidak terbentuknya kohesi kelompok. Hal tersebut tidak lain disebabkan gagalnya membentuk kelompok sebagai lapisan homogen maupun karena terlalu banyaknya anggota kelompok. Faktor-faktor atau variabel-variabel yang menghambat pemberdayaan serta menjadi penyebab mengapa masyarakat miskin tidak berdaya menghadapi lapisan yang “kuat”.(Kendala-kendala yang tersebut

diatas di asumsikan juga akan berdampak pula kepada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada.

Secara umum kendala yang dihadapi Kementerian Koperasi dan UKM adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang persebarannya kurang merata dan kurang memadai. Adanya gap kompetensi pegawai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan belum adanya sistem jenjang karir yang jelas dan belum adanya sistem kompensasi PNS yang berbasis kinerja menjadi salah satu kendala untuk memaksimalkan potensi Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya perspektif pimpinan instansi pemerintah dan dunia usaha mengenai pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Adanya perspektif yang seolah-olah pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah semata-mata urusan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kendala utama dalam mensinergikan potensi dan sumberdaya untuk pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.

2. Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengertian peranan sendiri bisa dijelaskan oleh pedapat ahli seperti: Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (Poerwadaminta,1976:241).

Dalam ensiklopedi Indonesia, Peranan adalah merumuskan dan mengorganisasikan aspirasi kelompok kedalam kegiatan yang terarah serta waspada terhadap keadaan yang mempengaruhi kesejahteraan.

Peranan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996:751). Peranan dapat diartikan langkah yang diambil seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan adalah melaksanakan kewajibannya dalam otonomi daerah dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar dapat memberdayakan masyarakat yang ada disekitarnya.

Pada pasal 15, pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Bupati Agam nomor 28 tahun 2008 terdapat peranan, tugas dan fungsi bidang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, Bidang pemberdayaan UMKM ini mempunyai fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha, pelaksanaan pelayanan dibidang kelembagaan dan bina usaha dan yang terakhir pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemberdayaan UMKM ini terdiri dari dua sub-bagian atau dua seksi yaitu seksi kelembagaan dan seksi bina usaha. Yang pertama seksi kelembagaan, seksi kelembagaan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2008. Tugas seksi kelembagaan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha mikro,kecil dan menengah dalam penumbuhan iklim usaha yang kondusif seperti,yang pertama menyediakan informasi sumber pendanaan, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan pendanaan, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga informasi, yang keempat kemitraan, yang kelima perizinan, yang keenam perlindungan dan yang ketujuh kewirausahaan.
- b. Melaksanakan, memperkuat dan memberdayakan organisasi ditingkat usaha mikro,kecil dan menengah baik organisasi usaha sejenis (asosiasi) maupun bentuk lainnya.
- c. Melaksanakan fasilitas akses dan penjaminan dalam penyediaan modal bagi usaha mikro,kecil dan menengah yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga non bank,modal Ventura, PKBL-BUMN,hibah dan sumber pembiayaan lainnya.
- d. Melaksanakan pembinaan dibidang kelembagaan
- e. Melaksanakan kerjasama dalam pembinaan usaha mikro,kecil dan menengah dengan dinas dan organisasi terkait.
- f. Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya HAKI, produk bersih dan berwawasan lingkungan.
- g. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan usaha mikro,kecil dan menengah.

- h. Melaksanakan pembuatan program pelatihan, magang dan temu usaha mikro, kecil dan menengah.

Kedua Seksi Bina Usaha, Seksi Bina Usaha ini mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Bina Usaha, peraturan ini dikeluarkan oleh Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2008 tentang penjabaran Tupoksi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan. Tugas Seksi Bina Usaha ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan usaha industri,
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro,kecil dan menengah,
- c. Melaksanakan identifikasi dan up dating data usaha mikro,kecil dan menengah
- d. Melaksanakan pembuatan proram pengembangan sarana promosi atau packing produk usaha mikro,kecil dan menengah
- e. Melaksanakan misi dagang dan promosi produk usaha mikro,kecil dan menengah dalam dan luar negeri
- f. Melaksanakan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis pembiayaan dan investasi usaha mikro,kecil dan menengah
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah yang meliputi: produk dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi dan desain

3. Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Menurut Tiktik Sartika Partomo (2009:3) pengertian UKM dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya berbeda. Di Negara yang satu mungkin diklasifikasikan sebagai UKM, tetapi bagi Negara lain bisa termasuk usaha besar.

Dalam buku Cornelis Rintuh dan Miar, Sutrisni mengatakan bahwa pola pengembangan ekonomi kerakyatan harus diprioritaskan melalui keberpihakan kepada sector usaha kecil dan menengah (UKM).

Kriteria umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu:

- a) Struktur organisasi yang sangat sederhana
- b) Tanpa staf yang tidak berlebihan
- c) Pembagian kerja yang “kendur”
- d) Memiliki hierarki manajer kecil
- e) Aktivitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan
- f) Kurang membedakan asset pribadi dari asset perusahaan.

Beberapa keunggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap usaha besar antara lain adalah:

- a) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b) Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil
- c) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat disbanding perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- e) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Tabel 2
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

| NO | URAIAN | KRITERIA | |
|----|----------------|---------------|---------------|
| | | ASSET | OMZET |
| 1 | USAHA MIKRO | Max 50 Jt | Max 300 Jt |
| 2 | USAHA KECIL | >50 Jt-500 JT | >300 Jt-2,5 M |
| 3 | USAHA MENENGAH | >500 Jt-10 M | >2,5 M-50 M |
| | | | |

Sumber: <file:///D:/file%20umkm/kerangka%20umkm.htm>

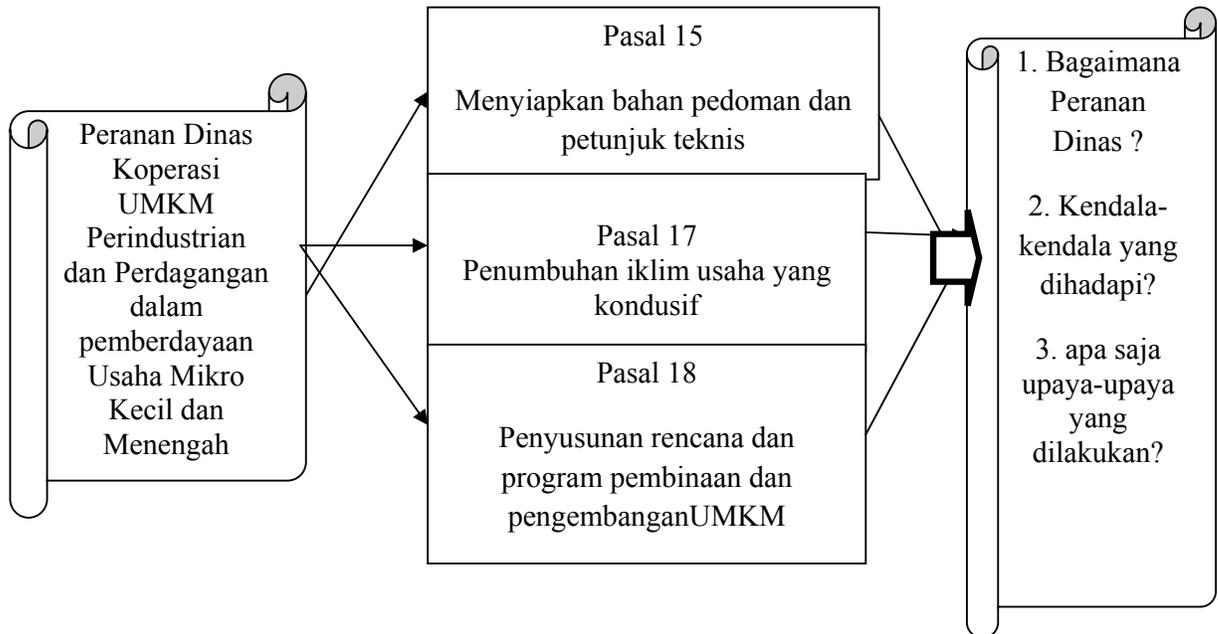
B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam mengadakan penelitian, sebab kerangka

konseptual disusun berdasarkan kepada kerangka teoritis. Dalam hal ini menjelaskan tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Mutiara, program - program Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan, bagaimana realita yang terlihat dilapangan apakah Usaha itu berkembang atau tidak, faktor - faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peranan Dinas sebagai Pemberdaya adalah tugas pokok dan fungsi dari Dinas seperti pembinaan, dimana pembinaan ini terdiri dari pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Pembinaan langsung seperti pelatihan, pameran, seminar dll, sedangkan pembinaan tidak langsung terdiri dari pendidikan dan latihan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ingin diberdayakan. Dari pembinaan ini peneliti melihat adanya kendala-kendala yang dihadapi pemberdaya dengan yang diberdayakan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Pembina agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah bisa diberdayakan. Secara sederhana kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Gambar kerangka konseptual di atas menerangkan bahwa dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah Peranan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, kendala-kendala yang ditemui Dinas selama proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, penyajian data dan pembahasan maka pada bab ini peneliti menyampaikan beberapa kesimpulan mengenai Peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan perannya sebagai pembina sekaligus pemberdaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Manfaat yang didapat oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah memperoleh pelatihan gratis yang diadakan oleh Dinas selaku pembina dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, dan memperoleh informasi mengenai pendanaan atau permodalan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Manfaat ini dirasakan oleh pelaku-pelaku usaha yang merasa membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan untuk memajukan suatu usaha yang mereka dirikan agar usaha bisa berkembang. Namun peranan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan masih dirasakan kurang oleh pelaku UMKM sebagai pemberdaya UMKM mereka.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah antara lain masalahnya adalah pelaku usaha masih bersifat tradisional, modal yang sangat minim, dan juga sumber daya manusia yang kurang kreatif dalam memproduksi hasil produksinya. Hal ini disebabkan kurang mencari informasi mengenai permodalan dan pengembangan usaha.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk masalah pertama yang dihadapi oleh pelaku usaha Mikro, kecil dan menengah adalah Dinas memberi pembinaan kepada pelaku usaha agar pelaku usaha mikro,kecildan menengah bisa melebarkan sayapnya menjadi pengusaha yang lebih baik dan tidak bersifat tradisonal lagi, dan mengenai permodalan Dinas telah bekerjasama dengan BUMN yang ada agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini bisa menambah modal usaha agar produk yang mereka miliki menjadi produk yang bisa bersaing dan tidak kalah dengan produk luar negeri lainnya.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, sejak berdirinya Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan ini telah terlihat bahwa Dinas melakukan perannya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya di usaha

kecil Akan tetapi peneliti memberikan masukan yang bisa di jadikan bahan evaluasi bagi Instansi yang terkait:

1. Sebaiknya Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai Pembina sekaligus Pemberdaya harus sering melakukan pembinaan dan memberikan doktrin-doktrin yang bisa memberikan motivasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar pelaku usaha mampu untuk berdaya.
2. Sebaiknya Dinas sebagai Pembina sekaligus Pemberdaya tidak keluar dari peranan, tugas dan kewajibannya sebagai pembina dan pemberdaya.
3. Sebaiknya Dinas sebagai Pembina sekaligus Pemberdaya harus mendatangkan Motivator atau Pengusaha UMKM yang telah berhasil agar dapat bekerja sama dengan UMKM khususnya yang ada di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi II). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____ 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Burhan Bingin. 2007. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Widyatama.
- Cornelis Rintuh dan Miar.2005. *Kelembagaan dan eksonomi Rakyat*. Yogyakarta : BPF- Yogyakarta.
- Datuak Maani. 2012. *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat*, Padang
- Diklat Kuliah Ekonomi Koperasi Dosen STIE Jakarta .
- Dunn, William. 1994. *Analisa Kebijakan Publik*. Jakarta: Gajah Mada University Press
- G. Kartasmita. 2003. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Herwidayatmo. 2002. *Mendorong Pemanfaatan Pasar Modal sebagai alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta:
- Lexi J. Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung:Rosdakarya.
- Muhammad Nasir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyanto.2007. “ *Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survai terhadap Pusat Perdagangan dan Wisata di Kota Surakarta)*” dalam Jurnal BENEFIT, Vol11, No.1, Juni 2007.
- Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranaka.1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta:Center For strategic and International Studies
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti.2007 *.Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Kabupaten Agam. 2011. *Rencana Stratejik Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan*. Pemkab Agam.

Poerwadarminto.W.. 1976. *Kamus Bahasa Indonesia*.Jakarta : Balai Pustaka.

Ropke, Jochen. 2003. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*. Jakarta: PT Selemba Empat.

Sugiyono.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Tatok Mardikanto.2012. *Pemberdayaan Masyarakat*.Bandung: ALFABETA

Tiktik Sartika Partomo. 2009. *Ekonomi Koperasi*.Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Wibowo. 2009. *Manajemen Kinerja*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonnesia Nomor 25 tahun 1992. Undang-undang Perkoperasian. Surabaya:ARLOKA.

Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2008 Penjabaran TUPOKSI Diskoperindag.

INTERNET

Rekapitulasi jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Agam Tahun 2012

[http//BAB III _Koperasi dan UMKM.com](http://BAB III _Koperasi dan UMKM.com)

file:///D:/file%20umkm/kerangka%20umkm.htm